

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar R.I Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Lampiran I Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 381.

## 2. Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm.53

Achmad Ali, 2005, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, Ghalia.Bogor. Indonesia, hlm. 1.

Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Cetakan I, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm.4

Diana Napitupulu, *KPK in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010 hlm.83

Indriyanto Seno Adji, dkk, 2016, Pengujian Oleh Publik (*Public Review*) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Indonesia Corruption Watch. Jakarta*, Hlm.134

Irfan Fachruddin., *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T. Alumni Bandung, 2004. Hal. 88

J.Aditjondro, 2002. *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru*, dalam Mencari Uang Rakyat Kajian Korupsi di Indonesia. Buku I. Yayasan Aksara. Yogyakarta.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafka, Jakarta, hlm. 2
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Mardjono Reksodiputro. 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. hlm.81
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.
- Moljatno, 1984, *Asas-asa Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, Hlm. 54
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010, Hlm. 28.
- Muladi dan Bardanawawi Arif, 2010, *Teori-teori Dalam Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, Hlm.197.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP-UNDIP.Semarang. Hlm. 20
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Edisi Perubahan 2017. Hal.20
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, Hlm. 24.
- Sofan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV. Armico, Hlm. 9
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto, Semarang , Hlm. 41
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 37.

### 3. Sumber Online (Naskah Publikasi, Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi)

Ahmad Jazuli, *Perubahan UU KPK antara Melemahkan dan Memperkuat Kinerja KPK*, Jurnal *Rechts Vinding Online*, 2016, Hlm.1-7

Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016, pp. 111 - 120

Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina, *Amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Naskah Publikasi. Info Singkat. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta. 2019, hal.25

Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam Wahyu Nugroho, 2014, Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Hlm.2 Naskah *online* diakses melalui [https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub\\_partisipasi\\_publik\\_20160728\\_min\\_usihen.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_min_usihen.pdf) pada tanggal 28 Januari 2020

Charlie Lumenta, 2014, Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014. Hlm.125-132 pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 10.47 wib

[https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/evaluasi\\_kpk\\_2015-2019\\_icw\\_tii.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/evaluasi_kpk_2015-2019_icw_tii.pdf), hlm. 20 diakses pada tanggal 21 Januari 2020

<https://www.voaindonesia.com/a/kpk-belum-tuntaskan-18-kasus-besar/4914747.html>

Husodo, Siswono Yudo. 2009. *Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi dan Politik*. Cet. 1. Baris Baru. Jakarta, dalam Wahyu Nugroho, 2014, Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87

- ICW, 2019, *Catatan Kinerja KPK 2015-2019*, Siaran Pers, <https://antikorupsi.org/id/siaran-pers/catatan-kinerja-kpk-2015-2019>, 14 May, 2019
- Indriyanto Seno Adji, dkk, Pengujian Oleh Publik (*Public Review*) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Indonesia Corruption Watch. Jakarta*, 2016, Hlm.134
- Irfan Fachruddin., *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T. Alumni Bandung, 2004. Hal. 88
- Iswandi, Fungsi Pengawasan Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia. Naskah Publikasi online:<https://www.academia.edu/8832583/> Fungsi\_Pengawasan\_Terhadap\_Tindakan\_Pemerintah\_Dalam\_Rangka\_Mewujudkan\_Su-premasi\_Hukum\_Di\_Indonesia. Diakses pada tanggal 19 Januari 2020.
- Jimly Asidqy, 2016, Penegakan Hukum, Naskah Online diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) dalam Muhammad Zulfadli, Kasman Abdullah dan Fuad Nur, 2016, Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa, Seminar Nasional, Makasar, Hlm. 266
- Johny Krisnan, 2008, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Program Magister Ilmu Hukum. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, *Tesis*, Hlm. 21
- Lihat Artikel Hukum, Aji Presetyo, *Dampak Instan Perubahan UU KPK*, Diakses Pada Website: *Hukum Online*, Tanggal 15 Oktober 2019
- Min Usihen, 2016. Kebijakan Analisis Dan Evaluasi Hukum, Diskusi Publik Partisipasi Publik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik, Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Hlm.2 Naskah *online* diakses melalui [https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub\\_partisipasi\\_publik\\_20160728\\_min\\_usihen.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_min_usihen.pdf) pada tanggal 28 Januari 2020
- Mohammad Hidayat Muhtar, *Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*, *Jambura Law Review*, 2019, Volume 1 Issue 01.

- Tri Andrisman, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) *Studi Penegakan Dan Pengembangan Hukum*, ISBN : 978-602-7509-50-4 yang diakses online melalui [jurnal.fh.unila.ac.id › index.php › monograf › article](http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/monograf/article/download) didownload pada tanggal 2 Januari 2020.
- Naskah Publikasi KPK, 2017, *Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner, Kisah Korupsi Kita*: KPK .Jakarta.
- Taylor, Dena dan Margaret Procter. “*The Literature Review: A Few Tips on Conducting It*” dimuat dalam laman *University Toronto Writing Center*. 2010. Hlm.2
- Tentang struktur organisasi KPK yang diakses dari <http://www.kpk.go.id/id/tentangkpk/struktur-organisasi/deputi-pipm>
- Titien Diah Soelistyarini, Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah, disampaikan dalam Pelatihan Penelitian dan Penulisan Ilmiah Seputar Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal FIB UNAIR, 14 Desember 2013
- Tumpak H.B,2020. Kode Etik Baru, KPK Sambut Era Baru.Berita KPK.Jakarta. Diakses online melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1516-kode-etik-baru-kpk-sambut-era-baru>
- Wahyu Nugroho, 2014, Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87
- Wawan Suyatmiko, Alvin Nicola,2019, Inisiatif Penguatan Lembaga Antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019, ISBN: 978-3-943497-57-1, *Transparency International Indonesia (TII)* hal.7. availabel online : [www.transparency.org](http://www.transparency.org) diakses pada tanggal 27 Desember 2019
- Yosephus Mainake dan Novianto M. Hantoro, 2019, *Judicial Review* Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Penelitian Bidang Hukum DPR.R.I, *Jurnal Info Singkat*, Vol. XI, No.20/II/Puslit/Oktober/2019 Artikel online <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc5290bac74f/mengurai-kewenangan-dewan-pengawas-kpk-oleh--reda-manthovani/>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2020